

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA MULYA SUBUR KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

PAZRI ANNISYA
175310846

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Penerapan Akuntansi pada Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan jenis data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Data skunder adalah data pendukung untuk melengkapi kebutuhan penelitian ini seperti: publikasi pemerintahan, analisis yang di berikan oleh media, web, internet, dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian yang dilakukan di desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan menunjukkan bahwa desa tidak memposting akun ke dalam buku besar, tidak membuat neraca saldo, tidak menambahkan Belanja Modal tahun 2019 pada Aset Tetap tahun 2019 dalam Laporan Kekayaan Milik Desa, tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap, dan tidak menghitung penyusutan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa. Penerapan akuntansi yang dilakukan oleh desa Mulya Subur belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Kata Kunci: Akuntansi Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pinsip Akuntansi Berterima Umum.

ABSTRACT

This research was conducted at the Mulya Subur Village Government, Pangkalan Lesung District, Pelalawan Regency. This study aims to determine the suitability of the application of accounting in Mulya Subur Village, Pangkalan Lesung District, Pelalawan Regency with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

This type of research uses qualitative methods using primary and secondary data types. Primary data is data obtained by conducting interviews and documents related to village financial management. Secondary data is supporting data to complete the needs of this research such as: government publications, analysis provided by the media, web, internet, and others. Data collection techniques that researchers do by conducting interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive method.

The results of research conducted by the village of Mulya Subur, Pangkalan Lesung District, Pelalawan Regency, show that the village does not post accounts to the general ledger, does not make a trial balance, does not add 2019 Capital Expenditures to Fixed Assets in 2019 in the Village Owned Wealth Report, does not depreciate the fixed assets, and does not calculate accumulated depreciation in the Village Property Report. The application of accounting carried out by Mulya Subur village is not in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

Keywords: *Village Accounting, Village Financial Management, Generally Accepted Accounting Principles.*

KATA PENGATAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta kekuatan yang diberikan-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yaitu dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA MULYA SUBUR KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan juga salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang nanti dapat membantu skripsi ini menuju kesempurnaan. Dalam menyelesaikan skripsi ini tentu banyak sekali hambatan dan rintangan, tetapi berkat izin Allah SWT, serta doa, motivasi, dan support dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafiraldi SH., MCI, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Prodi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau dan

juga sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan, serta tidak lupa penulis ucapkan kepada karyawan/pegawai Tata Usaha yang telah membantu administrasi selama masa perkuliahan dan membantu keperluan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Podo Sunatmo selaku Kepala Desa, Ibu Lisnawati selaku Kaur Keuangan, dan Ibu Fitria Manda Sari Susanti selaku Kaur Umum dan Perencanaan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di desa Mulya Subur dan membantu dalam proses penelitian.
6. Kedua orang tua saya tercinta, Abah Azhar Sitorus dan Emak Rusdah Sianipar yang telah memberikan motivasi, pengorbanan, serta do'a yang senantiasa dipanjatkan kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Saudara dan saudari saya Abang Saiful Bahri Sitorus, Abang Abdul Al-Kasah, Kakak Anna, Kakak Anni, Kakak Annazmi dan Adik saya Zuriya serta keluarga besar yang memberikan do'a, dukungan dan semangat kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi.
8. Fanji Azqon, Anisa Tika, Sherly Helena dan Yessi Supriana. Terimakasih sudah memberikan motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis.

9. Sahabat-sahabat seperjuangan yaitu Intan Priwana, Nabilah Tyas Garini Novri Esterina, dan Syifra Yolanda. Terimakasih sudah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Terimakasih saya ucapkan kepada diri saya sendiri yang telah bekerja keras dalam proses penelitian serta memiliki keinginan dan kemauan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis di balas oleh Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan terima kasih atas kritik dan saran yang selama ini telah diberikan.

Pekanbaru, 04 November 2021

Pazri Annisya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI...	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN	
PENGUJI SKRIPSI.....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL.....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
PERSETUJUAN PERBAIKAN.....	
ABSTRAK	I
ABSTRACT	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR TABEL.....	IX
DAFTAR GAMBAR.....	X
DAFTAR LAMPIRAN	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	9
2.1 Telaah Pustaka	9
2.1.1 Pengertian Desa dan Pemerintah Desa	9
2.1.2 Pengertian Akuntansi	10
2.1.3 Akuntansi Keuangan Desa.....	11
2.1.4 Prinsip-Prinsip Akuntansi	12
2.1.5 Metode Pencatatan dan Pengakuan Akuntansi Desa	14

2.1.5.1 Metode Pencatatan	14
2.1.5.2 Pengakuan Akuntansi	15
2.1.6 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa.....	16
2.1.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	17
2.1.7.1 Pendapatan Desa.....	18
2.1.7.2 Belanja Desa.....	18
2.1.7.3 Pembiayaan Desa	18
2.1.8 Pengelolaan Keuangan Desa.....	18
2.1.9 Pencatatan Pada Pengelolaan Keuangan Desa.....	19
2.1.9.1 Pencatatan Transaksi Pendapatan.....	19
2.1.9.2 Pencatatan Transaksi Belanja.....	19
2.1.9.3 Pencatatan Transaksi Pembiayaan.....	20
2.1.9.4 Pencatatan, Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih Pemerintah Desa	20
2.2 Hipotesis	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Desain Penelitian	21
3.2 Objek Penelitian.....	21
3.3 Jenis Data Dan Sumber Data	21
3.3.1 Data Primer.....	21
3.3.2 Data Sekunder	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.4.1 Wawancara	22
3.4.2 Dokumentasi.....	22
3.5 Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	24
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Mulya Subur	24
4.1.2 Visi dan Misi Desa Mulya Subur	24
4.1.2.1 Visi Desa Mulya Subur	24
4.1.2.2 Misi Desa Mulya Subur	24
4.1.3 Geografis Desa Mulya Subur	25
4.1.4 Demografis Desa Mulya Subur	26
4.1.5 Kondisi Ekonomi Desa Mulya Subur.....	27
4.1.6 Sosial Budaya Desa Mulya Subur	28
4.1.7 Pendidikan Desa Mulya Subur	30
4.1.8 Kesehatan Desa Mulya Subur	32
4.1.9 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mulya Subur	33
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	34
4.2.1 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi	34
4.2.2 Proses Akuntansi	35
4.2.2.1 Tahapan Pencatatan.....	35
4.2.2.2 Tahapan Penggolongan	40
4.2.2.3 Tahapan Pengikhtisaran	42
4.2.2.4 Penyesuaian.....	43
4.2.2.5 Tahap Pelaporan.....	50

BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... 54
5.1 Simpulan 54
5.2 Saran 55
DAFTAR PUSTAKA 57



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Usia Desa Mulya Subur Tahun 2019
Tabel 4.2	Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Mulya Subur Tahun 2019
Tabel 4.3	Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian Desa Mulya Subur Tahun 2019
Tabel 4.4	Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jumlah Pemeluk Agama Desa Mulya Subur Tahun 2019
Tabel 4.5	Klasifikasi Sarana Ibadah Desa Mulya Subur
Tabel 4.6	Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Etnis Desa Mulya Subur Tahun 2019
Tabel 4.7	Klasifikasi Berdasarkan Sarana Pendidikan Desa Mulya Subur Tahun 2019
Tabel 4.8	Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan 15 Tahun Ke Atas Desa Mulya Subur Tahun 2019
Tabel 4.9	Klasifikasi Sarana Kesehatan Desa Mulya Subur
Tabel 4.10	Buku Kas Umum Pemerintahan Desa Mulya Subur Tahun Anggaran 2019
Tabel 4.11	Buku Pembantu Bank Pemerintahan Desa Mulya Subur Tahun Anggaran 2019
Tabel 4.12	Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintahan Desa Mulya Subur Tahun Anggaran 2019
Tabel 4.13	Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintahan Desa Mulya Subur Tahun Anggaran 2019
Tabel 4.14	Buku Besar
Tabel 4.15	Buku Besar Pendapatan
Tabel 4.16	Buku Besar Belanja
Tabel 4.17	Neraca Saldo Tahun Anggaran 2019
Tabel 4.18	Aset Tetap
Tabel 4.19	Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2019
Tabel 4.20	Perhitungan Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019 Desa Mulya Subur
Tabel 4.21	Daftar Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019 Desa Mulya Subur
Tabel 4.22	Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2019

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Desa Mulya Subur



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Laporan Kekayaan Milik Desa
- Lampiran II Laporan Realisasi Pendapatan Anggaran dan Belanja Desa
- Lampiran III Buku Kas Umum
- Lampiran IV Buku Kas Pembantu Kegiatan
- Lampiran V Buku Pajak Desa
- Lampiran VI Buku Bank Desa
- Lampiran VII Daftar Aset Tetap



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem akuntansi pemerintah Indonesia awalnya ialah sistem sentralisasi kemudian di ubah menjadi sistem desentralisasi. Hal ini karena disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014 untuk menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dengan kebijakan desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia saat ini, salah satunya bertujuan untuk pemerataan pembangunan daerah-daerah yang belum terjamah oleh pemerintah pusat. Untuk menyejahterakan rakyat di Indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa. Masalah yang ada di desa harus segera ditindak lanjuti agar proses pembangunan bisa berjalan secara menyeluruh. Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat dengan peran untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan dan mewujudkan pembangunan pemerintah.

Desa merupakan ujung tombak untuk perubahan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan hak dan wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat 3 menyebutkan bahwa, Alokasi dana desa paling sedikit akan di berikan secara langsung ke desa sebesar 10% dari dana perimbangan yang akan diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Hal ini bertujuan agar desa dapat membuat program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti pengembangan sumber daya manusia desa, pengembangan teknologi desa, pengembangan prasarana desa dan pengembangan ekonomi desa.

Dana yang cukup besar yang diterima oleh desa tentunya harus ada pengawasan dan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, agar dana yang diterima oleh desa tidak disalah gunakan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemerintah desa harus mengelola dan mempertanggungjawabkan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Keuangan desa itu sendiri dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, antara lain: (1) Transparan, (2) Akuntabel, (3) Partisipatif dan (4) Tertip dan disiplin anggaran. Dengan adanya asas pengelolaan ini maka, desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan atas pertanggungjawaban realisasi anggaran terhadap dana yang telah digunakan sesuai dengan regulasi Pemerintah Pusat berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang baik. Laporan keuangan desa digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa diantaranya: Masyarakat Desa, Perangkat Desa, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Laporan keuangan desa yang wajib di laporkan oleh pemerintah desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu: (1) Anggaran, (2) Buku Kas, (3) Buku Pajak, (4) Buku Bank, dan (5) Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dengan adanya 5 (lima) laporan keuangan dalam pemerintah desa yang akan membantu pemerintahan desa terkait pelaporan keuangan desa dalam satu periode dan membandingkan dengan periode sebelumnya.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2016 menyebutkan bahwa “Laporan keuangan pemerintah desa menunjukkan laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah desa atas sumber daya yang dikelola dan/atau dipercayakan pada pemerintah desa”. Tujuan laporan akuntansi ialah memberikan informasi atas pengelolaan keuangan suatu entitas serta untuk mengevaluasi kinerja dalam periode tertentu. Kemudian, laporan keuangan berfungsi sebagai alat dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Untuk menghasilkan laporan keuangan Pemerintah Desa akan melalui beberapa tahapan siklus akuntansi. Adapun tahapan kegiatan akuntansi keuangan desa menurut IAI-KASP 2015, yaitu: “(1) Tahap Pencatatan, (2) Tahap Penggolongan, (3) Tahap Pengikhtisaran, dan (4) Tahap Pelaporan.” Dengan adanya tahapan siklus akuntansi akan membantu proses dalam menghasilkan laporan keuangan desa menjadi lebih terperinci dan tersusun secara baik serta sesuai dengan siklus standar yang berlaku.

Desa Mulya Subur merupakan desa yang terletak di Kecamatan Pangkalan Lesung dengan luas wilayah kurang lebih sekitar 825 Ha km². Desa Mulya Subur berdiri pada tanggal 10 Januari 1994. Desa Mulya Subur merupakan salah satu

dari 10 (sepuluh) desa di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang terletak 4 km ke arah Barat dari Kota Kecamatan. Desa Mulya Subur merupakan desa yang cukup aktif dan menjunjung tinggi transparansi dalam hal pengelolaan dana desa. Hal ini terbukti karena adanya rincian dana yang dilakukan oleh desa Mulya Subur dalam pengeluaran dana desa yang dipaparkan kepada masyarakat, serta besarnya dana dari pemerintah pusat yang mengharuskan adanya transparansi.

Proses akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan desa Mulya Subur dibagi dengan beberapa tahapan. Di tahap pertama, Bendahara desa melakukan pembukuan bukti transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluaran yang bersifat tunai ke dalam Buku Kas Umum (lampiran III). Selanjutnya, Buku Kas Pembantu Kegiatan (lampiran IV), diterapkan untuk mencatat transaksi yang mempengaruhi keuangan atau saldo kas desa untuk keperluan kegiatan sesuai bidangnya. Kemudian, Buku Pajak Desa (lampiran V) buku ini diperuntukkan mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penyetoran dan pemungutan pajak oleh desa. Untuk mencatat transaksi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran melalui bank maka akan dicatat ke dalam Buku Bank Desa (lampiran VI), selanjutnya Laporan Aset Tetap. Aset Tetap merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, di beli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah (lampiran VII).

Pada tahap terakhir atau tahap pelaporan kegiatan yang dilakukan ialah pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa (lampiran II). Laporan ini berisikan jumlah anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan pada tahun

anggaran tertentu. Berikutnya adalah Laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran I). Laporan ini, berisikan posisi aset dan kewajiban pemerintah desa. Desa Mulya Subur melakukan proses akuntansi dengan dilakukannya pencatatan secara terkomputerisasi. Hal ini terbukti bahwa desa Mulya Subur sudah menerapkan aplikasi komputer yang dikenal dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Desa Mulya Subur menggunakan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2016 yang sebelumnya dikenal sebagai SIMDA. Desa Mulya Subur menggunakan dasar pencatatan basis kas dan menggunakan sistem pencatatan *single entry*.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor desa, desa memerlukan alat tulis kantor, benda pos dan materai, cetak dan penggandaan, serta alat kebersihan dan alat-alat listrik. Pada akhir periode persediaan yang diperoleh tahun berjalan tidak seluruhnya habis terpakai. Namun, desa Mulya Subur tidak menghitung dan menyajikan nilai persediaan yang tersisa sehingga persediaan berjumlah Rp. 0 pada Laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran I).

Desa Mulya Subur tidak menghitung akumulasi penyusutan aset tetap dalam Laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran I) yaitu berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Serta dalam pembuatan laporan keuangannya, desa Mulya Subur tidak membuat buku besar dan neraca saldo.

Jumlah Aset tetap yang disajikan pada Laporan Kekayaan Milik Desa 2019 (lampiran I) Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 122.483.000 bukan merupakan penjumlahan dari nilai aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa 2018 (lampiran I) Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 61.483.000 ditambah dengan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Laporan Realisasi Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja 2019 (Lampiran II) sebesar Rp. 66.000.000. Pada Laporan Kekayaan Milik Desa 2019 (lampiran I) Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 262.397.700 jumlah tersebut bukan merupakan penjumlahan dari aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa 2018 (lampiran I) Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 262.397.700 dengan Belanja modal Gedung dan Bangunan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2019 (Lampiran II) sebesar Rp. 90.087.000. Kemudian, jumlah yang tercatat dalam Laporan Kekayaan Milik Desa 2019 (lampiran I) Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 1.700.019.800, sedangkan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2019 (Lampiran II) terdapat Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 844.709.000, dan pada Laporan Kekayaan Milik Desa 2018 (lampiran I) Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 1.700.019.800. Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa 2019 (lampiran I) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 1.600.000, dan pada Laporan Kekayaan Milik Desa 2018 (lampiran I) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 1.600.000, pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2019 (lampiran II) terdapat Belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 3.059.000.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah kesesuaian Penerapan Akuntansi Keuangan Desa pada desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuai penerapan akuntansi keuangan desa pada desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi dan teori yang dipelajari selama ini dan juga sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana setara di program Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
- b. Bagi Pemerintah Desa Mulya Subur, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu bagi aparatur dalam pengelolaan dana desa.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian di masa yang akan datang dengan materi penelitian yang sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari penelitian ini, maka penyusunan dan pengelompokan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan teori-teori yang mendukung penelitian ini yang berhubungan dengan hipotesis yang mengemukakan operasional penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan tentang gambaran umum objek penelitian serta hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan melakukan pembahasan pada hasil penelitian dengan menguraikan, menganalisis dan mengevaluasi penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mengemukakan kesimpulan penelitian yang ditemukan oleh penulis serta saran yang dapat bermanfaat bagi Kantor Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Desa dan Pemerintah Desa

Pengertian desa menurut Hoesada (dalam Yuliansyah, 2017:2) menyatakan bahwa:

Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang sama. Perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut: pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan, dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya desa adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.

Definisi desa menurut Bastian (2015:6) adalah sebagai berikut.

Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya. Suatu desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pengertian desa adalah sebagai berikut.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang memiliki nama, letak, serta batasan-batasan tertentu. Hal ini berguna untuk mempermudah pengurusan pemerintahan suatu desa itu sendiri.

Peraturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, peraturan, dan hukum adat yang berlaku berdasarkan wilayah dan adat suatu desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014:

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah desa.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

“Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.”

2.1.2 Pengertian Akuntansi

Menurut Rahmaniari dan Soegijanto (2016:3) dari sudut proses kegiatan:

“Akuntansi yaitu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisis data keuangan organisasi”.

Pengertian akuntansi menurut Sinaga (2016:15) adalah sebagai berikut. Akuntansi berasal dari bahasa Inggris “*to account*” yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengelolaan atau pengurus dari suatu perusahaan kepada pemiliknya, atas kepercayaan yang telah diberikan kepada pengelola tersebut untuk menjalankan kegiatan perusahaan.

Menurut Hanafi dan Halim (2016:27): “Akuntansi bisa didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgment*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut”.

Menurut Carl S. Warren dkk (2017:3) pengertian dari akuntansi adalah sebagai berikut.

Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi adalah “bahasa bisnis” (*language of business*) karena melalui akuntansilah informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan.

Menurut Alvin A. Arens dkk (2015:18): “Akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis dengan tujuan menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.”

2.1.3 Akuntansi Keuangan Desa

Menurut Sujarweni (2015:17) pengertian akuntansi desa adalah sebagai berikut.

Akuntansi desa adalah berupa pencatatan yang terdiri dari sebuah proses transaksi yang terjadi pada suatu desa, yang dibuktikan dengan nota-nota yang kemudian akan dilakukan pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang akan menghasilkan informasi yang nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1: “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”.

Menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa:

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2)nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Berkaitan dengan pengertian keuangan desa, Hoesada (2016:322) mengemukakan bahwa: “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan satuan mata uang.”

Pihak-pihak yang menggunakan informasi akuntansi menurut Wijaya (2018:136) adalah sebagai berikut.

1. Pihak internal, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Urusan /Kepala Seksi
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu badan yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDDesa.
3. Pemerintah, yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota mengingat anggaran desa berasal dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan.
4. Pihak lainnya, yaitu para pihak yang memungkinkan melihat laporan keuangan desa, seperti Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, dan lain sebagainya.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Akuntansi

Prinsip-prinsip akuntansi adalah pengawas untuk pembuatan laporan keuangan. Sehingga, hal ini diharapkan dapat mempermudah pihak eksternal yang memiliki kepentingan dapat membandingkan laporan keuangan desa yang satu dengan desa yang lain.

Menurut IAI KASP Tahun 2015, prinsip-prinsip akuntansi yang di gunakan adalah sebagai berikut.

1. Prinsip Harga Perolehan

Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (*asset*), kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertansaksi. Harga perolehan ini bernilai objektif sesuai dengan nilai yang yang dikeluarkan/dibayarkan dari kas/bank.

2. Prinsip Realisasi Pendapatan

Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (*asset*) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas.

3. Prinsip Objektif

Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi.

4. Prinsip Pengungkapan Penuh

Dalam pembuatan laporan keuangan hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat mempengaruhi keputusan.

5. Prinsip Konsistensi

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya

laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.

2.1.5 Metode Pencatatan dan Pengakuan Akuntansi Desa

2.1.5.1 Metode Pencatatan

Menurut Halim dan Kusufi (2018:45-50) terdapat beberapa metode pencatatan dalam akuntansi, diantaranya yaitu:

1. *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

2. *Double Entry*

Sistem pencatatan *double entry* sering disebut dengan sistem tata buku berpasangan. Pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dalam sistem ini disebut dengan istilah menjurnal.

3. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara pencatatan *double entry* dilaksanakan, metode *triple entry* akan bekerja dengan melakukan pencatatan yang dilakukan oleh PPKSKPD (Pejabat Pengelola

Keuangan Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah).

2.1.5.2 Pengakuan Akuntansi

Dasar pengakuan akuntansi merupakan penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Agar dapat menentukan kapan suatu transaksi dicatat digunakan berbagai macam sistem atau basis.

Dalam buku Halim dan Kusufi (2018:54-55) dasar akuntansi terbagi menjadi empat jenis, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Basis Kas

Basis kas adalah pengakuan/ pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan kas.

2. Basis Akrua

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan hanya bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar).

3. Basis Kas Modifikasi

Mencatat transaksi selama setahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4. Basis Akrua Modifikasi

Mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebahagian transaksi.

2.1.6 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Halim dan Kusufi (2018:57) menyatakan bahwa: “Siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang ada dalam sistem akuntansi.”

Proses akuntansi yang dimulai dengan menganalisis dan menjurnal transaksi-transaksi dan diakhiri dengan menyiapkan neraca saldo setelah penutup disebut dengan siklus akuntansi. (Carl S. Warren dkk, 2017:175)

Menurut Wijaya (2018:140-141) siklus akuntansi terdiri dari 4 (empat) tahapan penting siklus akuntansi, antara lain sebagai berikut.

1. Tahap Pencatatan

Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan pada buku yang sesuai.

2. Tahap Penggolongan

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi ialah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi pada kelompok buku besar sesuai nama akun dan saldo-saldo yang dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

3. Tahap Pengikhtisaran

Tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Dengan dibuatnya neraca saldo itu, akan mempermudah penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu.

Laporan Kekayaan Milik Desa bisa berfungsi untuk memeriksa keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa, jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang sehingga perlu pemeriksaan saldo debit dan kredit dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Jadi, pembuktian bukan merupakan indikasi bahwa pencatatan dilakukan dengan benar.

4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahapan akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain sebagai berikut.

- a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, yang memuat jumlah anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan dari pemerintah desa bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.
- b. Membuat Laporan Kekayaan Milik Desa, yang memuat posisi dari aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

2.1.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Berdasarkan pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengemukakan bahwa “Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.”

Menurut IAI KASP Tahun 2015, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas.

2.1.7.1 Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan berdasarkan kelompok dan jenis.

2.1.7.2 Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

2.1.7.3 Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

2.1.8 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, menyebutkan bahwa.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya.

Menurut IAI KASP Tahun 2015, pengelolaan keuangan desa, meliputi sebagai berikut.

1. Rencana.
2. Pelaksanaan.
3. Penatausahaan.
4. Pelaporan.
5. Pertanggungjawaban.
6. Pembinaan dan Pengawasan.

2.1.9 Pencatatan Pada Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.9.1 Pencatatan Transaksi Pendapatan

1. Pendapatan asli desa, pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari hasil usaha, hasil aset.
2. Transfer, pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan APBD dari Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan Lain-lain, pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

2.1.9.2 Pencatatan Transaksi Belanja

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas belanja yang dilakukan berdasarkan pada kelompok: Penyelenggaraan Pemerintah Desa; Pelaksanaan Pembangunan Desa; Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan Belanja Tak Terduga.

2.1.9.3 Pencatatan Transaksi Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan, pada kelompok ini dicatat penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Hasil penjualan Kekayaan Milik Desa yang dipisahkan.
2. Pengeluaran Pembiayaan, pada kelompok ini dicatat pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, penempatannya pada rekening tersendiri dan penganggarnya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

2.1.9.4 Pencatatan, Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih Pemerintah Desa

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang mempengaruhi posisi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah desa pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan (per 31 Desember). Dilakukan pencatatan untuk transaksi yang mencerminkan hak dan kewajiban dari pemerintah desa pada akhir tahun anggaran berupa pencatatan piutang ataupun hutang.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

Penerapan Akuntansi Keuangan Dana Desa pada Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang cenderung menganalisis, menemukan, menggambarkan, menjelaskan, dan menyelidiki dari suatu permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Ahmadi, 2016:15): “Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Objek penelitian pada penelitian ini ialah desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

3.3 Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang peneliti gunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi secara langsung terhadap Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR) Keuangan guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Menurut Sekaran dan Bougie (2017:130): “Sumber skunder misalnya: catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri yang di berikan oleh media, web, internet, dan lainnya.”

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

3.4.1 Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara langsung yang peneliti lakukan terhadap Kepala Urusan Pemerintah (KAUR) Keuangan Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam penelitian ini.

Menurut Dexter (dalam Ahmadi, 2016:120): “Tujuan wawancara antara lain untuk memperoleh bentuk-bentukan disini dan sekarang dari orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, klaim, perhatian, dan cantuman lainnya tentang cantuman-cantuman seperti sebagaimana dialami di masa lalu”.

3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan cara pengambilan dokumen-dokumen guna memperoleh informasi untuk penelitian ini. Menurut Ghony dan Almanshur (2016:199): “Dokumen meliputi materi (bahan) seperti: fotografi, video, film, surat, memo, *diary*, rekaman kasus klinis, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang”.

3.5 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga dapat dipahami dengan baik apakah desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sudah menerapkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dituangkan dalam penelitian ini. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecah masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Irina, 2017:100).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Mulya Subur

Desa Mulya Subur berdiri pada tanggal 10 Januari 1994, yang mana desa Mulya Subur berasal dari desa eks transmigrasi UPT VII SP VII PT. Sari Lembah Subur Tahun 1990 dan Tahun 1991 sebanyak 325 Kepala Keluarga (KK) yang datang dari berbagai wilayah di Provinsi Indonesia. Desa Mulya Subur dibagi menjadi 2 Dusun dengan jumlah 4 Rukun Warga (RW) dan 11 Rukun Tetangga (RT) dengan pembagian wilayah sbagai berikut.

Dusun I disebut sebagai Dusun Marga Mulya dengan 2 RW dan 6 RT

Dusun II disebut sebagai Dusun Bakti Mulya dengan 2 RW dan 5 RT

Sebagai desa otonom, pemerintahan di desa Mulya Subur di pimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh Sekertaris Desa dan Anggota aparat pemerintah desa. Desa Mulya Subur memiliki sifat kegotong royongan yang sangat tinggi dalam dalam kehidupan sehari-hari.

4.1.2 Visi dan Misi Desa Mulya Subur

4.1.2.1 Visi Desa Mulya Subur

Terwujudnya Mulya Subur sebagai desa yang mandiri berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas, sejahtera, tentram, nyaman, aman, beriman, dan bertaqwa tahun 2030.

4.1.2.2 Misi Desa Mulya Subur

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa seperti: jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.

2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
4. Memajukan usaha milik desa (Bumdes) sebagai lembaga pengelola hasil produktifitas masyarakat desa.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembentukan UKM yang produktif sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan pasar.
6. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
7. Mengorganisir kaum muda desa Mulya Subur dan meningkatkan peran serta sebagai kader pembangunan kader pemimpin masa depan.

4.1.3 Geografis Desa Mulya Subur

Desa Mulya Subur merupakan salah satu dari 10 desa di wilayah Kecamatan Pangkalan Lesung yang terletak 4 Km ke arah Barat dari Kota Kecamatan. Desa Mulya Subur mempunyai luas wilayah kurang lebih sekitar 825 Ha Km² dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Lesung

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sari Makmur

Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Lesung

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Genduang

Iklm yang ada di Desa Mulya Subur juga memiliki kesamaan sebagaimana desa-desa lainnya di wilayah Indonesia yang mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanaman yang ada di desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung. Dengan suhu udara maksimal 34° C dan suhu minimal 28° C dan mempunyai curah hujan dan kemarau yang seimbang. Dengan kondisi tanah yang berbukit sehingga di musim kemarau agak sedikit sulit untuk mendapatkan sumber air.

4.1.4 Demografis Desa Mulya Subur

Desa Mulya Subur memiliki penduduk sebesar 1.388 jiwa pada tahun 2019 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Usia Desa Mulya Subur Tahun 2019

No	Umur	Jumlah	Peresentase
1	0 – 12 Bulan	21 jiwa	1,51%
2	> 1 - < 5 Tahun	91 jiwa	6,56%
3	> = 5 - < 7 Tahun	70 jiwa	5,04%
4	> = 7 - < 15 Tahun	235 jiwa	16,93%
5	> 15 – 56 Tahun	840 jiwa	60,52%
6	> 56 Tahun	131 jiwa	9,44%
Jumlah		1.388 jiwa	100%

Sumber: Kantor Desa Mulya subur

Tabel 4.2
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Mulya Subur Tahun 2019

No	Jenis	Jumlah	Peresentasi
1	Jumlah Kepala Keluarga	394 KK	
2	Jumlah Penduduk Laki-laki	682 jiwa	49,14%
3	Jumlah Penduduk Perempuan	706 jiwa	50,86%
4	Jumlah Penduduk	1.388 jiwa	100%

Sumber: Kantor Desa Mulya subur

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dengan jumlah sebesar 682 jiwa atau 49,14% dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan dengan jumlah sebesar 706 jiwa atau 50,86%.

4.1.5 Kondisi Ekonomi Desa Mulya Subur

Ekonomi masyarakat desa Mulya Subur cukup baik dan mulai sangat berkembang, hal ini ditandai dengan banyaknya anak desa Mulya Subur yang mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dan banyaknya masyarakat yang telah mampu untuk menunaikan Rukun Islam yang kelima atau melakukan ibadah haji.

Sumber daya alam desa Mulya Subur di dominasi oleh sektor perkebunan baik dari perkebunan kelapa sawit maupun perkebunan karet. Hal ini didukung oleh keadaan alam dan iklim desa Mulya Subur yang sangat cocok untuk tanaman jenis perkebunan tersebut, dimana desa Mulya Subur memiliki kondisi tanah yang sangat bagus dan subur serta berada di jalur kawasan perkebunan yang potensial untuk maju dan berkembang pesat.

Tabel 4.3
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian Desa Mulya Subur
Tahun 2019

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Peresentase	Perempuan	Peresentase
1	Petani	212	53,13%	-	-
2	Buruh Tani	150	37,59%	-	-
3	PNS	9	2,26%	5	55,56%
4	Pedagang	8	2,01%	3	33,33%
5	Montir	2	0,50%	-	-
6	Bidan Swasta	-	-	1	11,11%
7	Pembantu Rumah Tangga	-	-	-	-
8	TNI	-	-	-	-
9	Pengusaha Kecil Menengah	-	-	-	-
10	Karyawan Perusahaan Swasta	18	4,51%	-	-
11	Karyawan Perusahaan Pemerintah	-	-	-	-
Jumlah		399	100%	9	100%

Sumber: Kantor Desa Mulya subur

Berdasarkan mata pencariannya dapat dilihat pada tabel di atas bahwa penduduk desa Mulya Subur lebih banyak menjadi petani dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 212 jiwa atau sebesar 53,13%.

4.1.6 Sosial Budaya Desa Mulya Subur

Penduduk desa Mulya Subur yang heterogen berasal dari seluruh wilayah yang ada di Negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang berbeda telah melahirkan banyak organisasi dan seni budaya walaupun demikian masyarakat desa Mulya Subur dapat hidup

berdampingan dengan harmonis antara satu sama lainnya. Ini disebabkan antara masing-masing suku dan agama dapat saling menghargai dan menghormati.

Mayoritas penduduk desa Mulya Subur adalah suku Jawa sebagai penduduk tempatan. Selain itu desa Mulya Subur juga terdiri dari berbagai macam suku seperti: Suku Nias, Minang, Madura, Batak, serta Melayu. Disisi kehidupan beragama penduduk desa Mulya Subur mayoritas adalah beragama Islam, Khatolik, dan Hindu dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jumlah Pemeluk Agama Desa Mulya Subur Tahun 2019

No	Agama	Laki-laki	Peresentase	Perempuan	Peresentase
1	Islam	678	99,41%	699	99,01%
2	Protestan	1	0,15%	4	0,57%
3	Khatolik	-	-	-	-
4	Hindu	3	0,44%	3	0,42%
5	Budha	-	-	-	-
Jumlah		682	100%	706	100%

Sumber: Kantor Desa Mulya subur

Berikut ini dapat di lihat sarana beribadah yang ada di desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Tabel 4.5
Klasifikasi Sarana Ibadah Desa Mulya Subur

No	Nama	Letak
1	Masjid An-Nur	RT 001 / RW 002
2	Musholla Al Madinah	RT 001 / RW 001
3	Musholla Al Mujahidin	RT 002 / RW 001
4	Musholla Al Anshor	RT 002 / RW 001
5	Musholla Al Hidayah	RT 003 / RW 001
6	Musholla Nurul Mujahidin	RT 001 / RW 002
7	Musholla Al Furqon	RT 002 / RW 004
8	Musholla Al Ikhlas	RT 001 / RW 003
9	Musholla Nurul Iman	RT 002 / RW 003
10	Musholla Al Taqwa	RT 002 / RW 002

Sumber: Kantor Desa Mulya subur

Tabel 4.6
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Etnis Desa Mulya Subur Tahun 2019

No	Etnis	Laki-laki	Peresentase	Perempuan	Peresentase
1	Aceh	8	1,17%	3	0,42%
2	Batak	26	3,81%	31	4,40%
3	Nias	2	0,29%	2	0,28%
4	Melayu	14	2,05%	18	2,55%
5	Minang	4	0,59%	1	0,14%
6	Jawa	579	84,90%	606	85,84%
7	Sunda	16	2,35%	14	1,98%
8	Madura	30	4,40%	28	3,97%
9	Bali	3	0,44%	3	0,42%
Jumlah		682	100%	706	100%

Sumber: Kantor Desa Mulya subur

4.1.7 Pendidikan Desa Mulya Subur

Di desa Mulya Subur terdapat beberapa sarana pendidikan sekolah baik yang sudah negeri maupun yang masih dalam status swadaya atau sekolah swasta, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.7
Klasifikasi Berdasarkan Sarana Pendidikan Desa Mulya Subur Tahun 2019

No	Nama Sekolah	Tahun Berdiri	Tahun 2019
1	SDN 008 MULYA SUBUR	1992	1 Unit
2	TK MELATI	1996	1 Unit
3	MDTA MUSTABNUL KHAIRAT	2012	1 Unit

Sumber: Kantor Desa Mulya subur

Dengan meningkatnya sarana pendidikan di kelurahan pangkalan Lesung maka semakin meningkat pula pengetahuan masyarakat, secara rinci dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan
15 Tahun Ke Atas Desa Mulya Subur Tahun 2019

No	Urain	Tahun 2019	Peresentase
1	Jumlah penduduk buta huruf	3 Orang	0,24%
2	Jumlah penduduk tidak tamat SD sederajat	96 Orang	7,64%
3	Jumlah penduduk tamat SD sederajat	481 Orang	38,27%
4	Jumlah penduduk tamat SLTP sederajat	268 Orang	21,32%
5	Jumlah penduduk tamat SLTA sederajat	323 Orang	25,69%
6	Jumlah Penduduk Tamat D-1	1 Orang	0,08%
7	Jumlah Penduduk Tamat D-2	2 Orang	0,16%
8	Jumlah Penduduk Tamat D-3	22 Orang	1,75%
9	Jumlah Penduduk Tamat S-1	57 Orang	4,53%
10	Jumlah Penduduk Tamat S-2	4 Orang	0,32%
Jumlah		1.257 Orang	100%

Sumber: Kantor Desa Mulya subur

4.1.8 Kesehatan Desa Mulya Subur

Desa Mulya subur sebagai desa yang sudah mulai berkembang memiliki sarana kesehatan yaitu 1 unit Puskesmas dan 1 unit Posyandu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9
Klasifikasi Sarana Kesehatan Desa Mulya Subur

No	Gedung	Keadaan	Keterangan
1	1 Unit rumah Bidan Desa	Baik	Layak pakai
2	1 Unit Gedung Puskesmas	Baik	Layak pakai
3	1 Unit Gedung Posyandu	Baik	Layak pakai

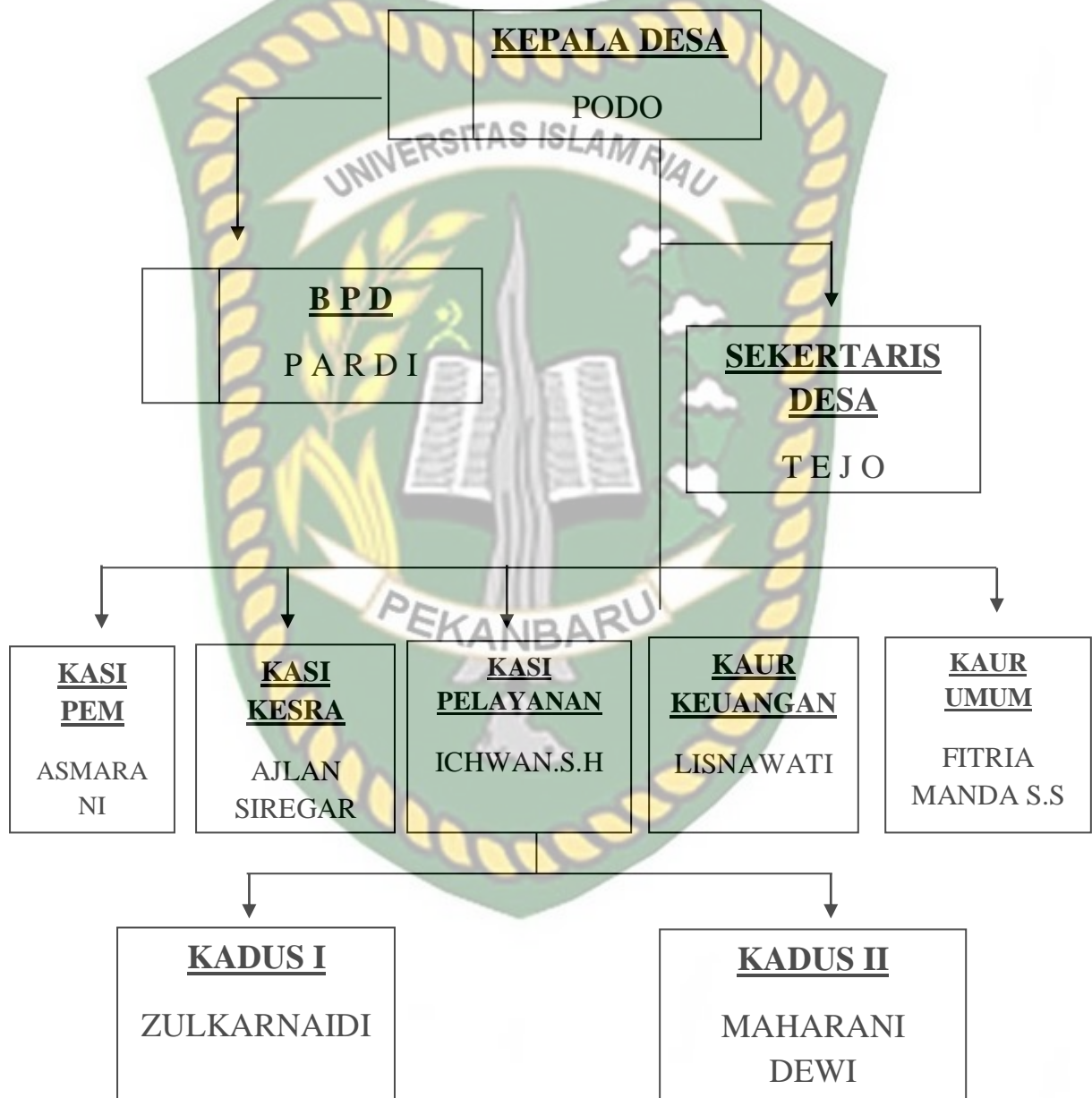
Sumber: Puskesmas Desa Mulya Subur

4.1.9 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mulya Subur

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR DESA MULYA SUBUR



Sumber: Kantor Desa Mulya Subur

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini akan menjabarkan hasil penelitian penerapan akuntansi pada desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada bab I yang diperoleh dari data desa Mulya Subur dan di dukung dengan teori-teori yang relevan yang telah dijabar pada bab II, maka penulis akan menganalisis akuntansi keuangan yang diterapkan pada desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Dari analisis yang telah diterapkan pada desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, penerapan akuntansi di desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

4.2.1 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi

Sistem pencatatan desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan adalah sistem *single entry* atau juga disebut dengan tata buku tunggal. *Single entry* atau tata buku tunggal artinya ialah setiap terjadinya transaksi maka pencatatannya dicatat secara tunggal atau satu kali. Kas yang bertambah akan dicatat pada kolom penerimaan, jika kas yang berkurang akan dicatat ke dalam kolom pengeluaran.

Dasar pengakuan akuntansi pada desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan adalah basis kas (*cash basis*). Desa Mulya Subur mencatat semua transaksi apabila kas sudah diterima ataupun pada saat kas dikeluarkan. Artinya adalah pencatat baru dilakukan apabila terjadi transaksi yang mana uang benar-benar sudah diterima atau dikeluarkan.

4.2.2 Proses Akuntansi

Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung sudah menggunakan sistem siskeudes dalam melakukan tahapan proses akuntansi, dimana sistem siskeudes ini digunakan sejak tahun 2016. Penggunaan sistem siskeudes bertujuan agar memudahkan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015, terdapat empat tahapan dalam siklus akuntansi, yaitu:

4.2.2.1 Tahapan Pencatatan

Tahap pencatatan adalah tahap awal dalam proses siklus akuntansi. Pada tahap ini, desa akan mencatat transaksi yang terjadi dan kemudian dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai. Buku tersebut adalah buku kas umum, buku kas pembantu kegiatan, buku bank, dan buku pajak. Sumber pendapatan desa Mulya Subur berasal dari Pendapatan Transfer berupa dana desa, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan dari APBD provinsi. Pendapatan Asli Desa berupa bagi hasil BUMDes. Pendapatan Lain-lain berupa pendapatan desa yang sah seperti: Uang hadiah lomba STBM tingkat provinsi. Untuk pengeluaran desa berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas pada desa Mulya Subur. Berikut adalah buku kas umum yang telah disusun oleh desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini.

Tabel 4.10
Buku Kas Umum
Pemerintahan Desa Mulya Subur
Tahun Anggaran 2019

No	Tanggal	Kode Rek	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No Bukti	Saldo
1	10/12 / 2019		Pengambilan DD Bulan Desember 2019				
			Kas di Bendahara	343.392.000			343.392.000
2	10/12 / 2019	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa		6.000.000	0053 /SPP/ 04. 2006 /2019	337.392.000
3	10/12 / 2019	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		21.000.000	0054 /SPP/ 04. 2006 /2019	316.392.000
4	10/12 / 2019	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa		7.500.000		308.892.000
5	10/12 / 2019	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			0055 /SPP/ 04. 2006 /2019	
			Insentif RT/RW		6.800.000		302.092.000

Sumber: *Buku Kas Umum Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Tahun 2019*

2. Buku Pembantu Bank

Buku bank digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan saldo pada bank, segala transaksi pendapatan transfer dicatat ke dalam buku bank. Transaksi pendapatan transfer tersebut berupa penerimaan ADD (Alokasi Dana Desa), penerimaan uang hadiah lomba STBM tingkat propinsi, dan pengambilan uang bantuan keuangan provinsi Riau. Berikut buku bank yang disusun oleh desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini.

Tabel 4.11
Buku Pembantu Bank
Pemerintahan Desa Mulya Subur
Tahun Anggaran 2019

Nama Bank : Bank Riau Kepri
No. Rek : 112.02.00073

No	Tang gal	Uraian Transaksi	Bukti Trans aksi	Pemasukan		Pengeluaran		Saldo
				Setoran (Rp)	Bun ga Ban k (Rp)	Penarikan	P a j a k	
1	01/01/2019	Saldo Awal		27.939.900				27.939.900
2	15/05/2019	Diterima ADD Tahap I (60%)	0003 /TBP/ 04. 2006 /2019	474.928.200				502.868.100
3	15/05/2019	Diterima ADD Tahap I (20%)	0004 /TBP/ 04. 2006 /2019	168.259.600				671.127.700
4	22/05/2019	Pengambil an ADD Bulan Mei	0001 /BAN K/ 04. 2006 /2019			290.035.000		381.092.700
5	13/06/2019	Pengambil an ADD Bulan Juni	0002 /BAN K/ 04. 2006 /2019			170.202.000		210.890.700

Sumber: Buku Pembantu Bank Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Tahun 2019

3. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa

Buku kas pembantu kegiatan merupakan penatausahaan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan berupa pencatatan dalam buku kas pembantu kegiatan dan laporan dengan catatan segala jenis kegiatan yang diselenggarakan desa

dengan menggunakan dana desa, dan dicatat sesuai bidang dan kegiatan. Bidang kegiatan yang dilakukan oleh desa Mulya Subur, yaitu: (a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, (c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan (d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Berikut adalah buku kas pembantu kegiatan yang telah disusun oleh desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini.

Tabel 4.12
Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintahan Desa Mulya Subur
Tahun Anggaran 2019

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. Sub Bidang : 4.07. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
3. Kegiatan : 4.07.04. Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

No	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)		Pengembalian Ke Kas Desa (Rp)	Saldo Kas (Rp)
					Belanja brg dan jasa	Belanja Modal		
1	18/12/2019	0073/SPP/04.2006/2019	Pelatihan Pembuatan Kripik Buah	8.800.000				8.800.000
2	18/12/2019	00419/KWT/04.2006/2019	Belanja Upah/ Jasa Service Mesin Penggorengan Buah		1.500.000			7.300.000
	19/12/2019	00421/KWT/04.2006/2019	Belanja Minyak Goreng dan Pepaya Pelatihan Membuat Kripik Buah		2.050.000			5.250.000
4	20/12/2019	00422/KWT/04.200	Belanja Makan Minuman		780.000			4.470.000

	9	6 /2019	Pelatihan Membuat Kripik Buah					
5	20/ 12/ 201 9	00426 /KWT/ 04.200 6 /2019	Belanja Uang Saku Peserta Pelatihan Membuat Kripik Buah		1.000.000			3.470.000

Sumber: Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Tahun 2019

4. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pajak. Berikut adalah buku pembantu pajak yang telah disusun oleh desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang dapat dilihat pada tabel 4.13 dibawah ini.

Tabel 4.13
Buku Kas Pembantu Pajak
Pemerintahan Desa Mulya Subur
Tahun Anggaran 2019

No	Tang gal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Ssaldo (Rp)
1	10/12 /2019	Tagihan Belanja Semen, Plastik Hitam, Waremesh, dll Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 002			
		Potongan Pajak PPh 22	904.527		904.527
		Potongan Pajak PPN Pusat	6.030.182		6.934.709
2	12/12 /2019	Belanja Drum Pelatihan Pengolahan Limbah Sapi			
		Potongan Pajak PPN Pusat	103.636		7.038.345
3	15/12 /2019	Belanja Honorarium Narasumber Pelatihan			

		Pengolahan Limbah Sapi			
		Potongan Pajak PPh 21	90.000		7.128.345
4	18/12 /2019	Belanja Upah/ Jasa Service Mesin Penggorengan Buah			
		Potongan PPh Pasal 23	30.000		7.158.345
5	26/12 /2019	PPN Belanja Semen, Plastik Hitam, Wiremesh, dll Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 002			
		Potongan Pajak PPN Pusat		6.030.182	1.128.163

Sumber: *Buku Pembantu Pajak Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Tahun 2019*

4.2.2.2 Tahapan Penggolongan

Tahap kedua siklus akuntansi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahapan mengelompokkan catatan yang terkait dengan transaksi yang akan di kelompokkan ke dalam buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit. Tahap penggolongan dapat memudahkan kita dalam menganalisa laporan keuangan desa dan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam melakukan pencatatan.

Pada tahap penggolongan ini desa Mulya Subur tidak memposting akun yang ada ke dalam buku besar. Hal ini mengakibatkan tidak diketahuinya saldo akhir dari masing-masing akun dan juga akan berdampak dengan pembuatan neraca saldo, sehingga tidak sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Berikut contoh format buku besar dengan sebagian akun yang dimiliki oleh desa Mulya Subur yang seharusnya di terapkan oleh desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan:

Tabel 4.14
Buku Besar

Nama Akun: Kas

No. Akun: 1.1.1

No	Tang gal	Uraian	R e f	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
						Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1	10/12/ 2019	Pengambilan DD Bulan Desember 2019		343.392.000		343.392.000	
2	10/12/ 2019	Pembayaran Penghasilan Kepala Desa			6.000.000	337.392.000	
3	10/12/ 2019	Pembayaran Penghasilan Perangkat Desa			21.000.000	316.392.000	
4	10/12/ 2019	Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa			7.500.000	308.892.000	
5	10/12/ /2019	Pembayaran Insentif RT/RW			6.800.000	302.092.000	

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Tabel 4.15
Buku Besar

Nama Akun: Pendapatan

No. Akun: 4.1.1

No	Tang gal	Uraian	R e f	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
						Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1	10/12/ 2019	Pengambilan DD Bulan Desember 2019		343.392.000			343.392.000

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Tabel 4.16
Buku Besar

Nama Akun: Belanja Pegawai

No. Akun: 5.1.1

No	Tang Gal	Uraian	R e f	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
						Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1	10/12/2019	Pembayaran Penghasilan Kepala Desa		6.000.000		6.000.000	
2	10/12/2019	Pembayaran Penghasilan Perangkat Desa		21.000.000		27.000.000	
3	10/12/2019	Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa		7.500.000		34.500.000	
4	10/12/2019	Pembayaran Insentif RT/RW		6.800.000		41.300.000	

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

4.2.2.3 Tahapan Pengikhtisaran

Tahap siklus akuntansi yang ketiga yaitu tahap pengikhtisaran. Adapun tahap ini melakukan pencatatan dari buku besar ke neraca saldo. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

Neraca saldo berisikan nama-nama akun di buku besar beserta dengan saldo akhirnya. Hal ini bertujuan untuk melihat keseimbangan antara jumlah debit dan jumlah kredit pada nama-nama akun yang terdapat dalam buku besar. Neraca saldo dianggap benar apabila terjadi kesamaan antara jumlah keseluruhan pada kolom debit dan jumlah keseluruhan pada kolom kredit. Namun, desa Mulya Subur tidak melakukan pencatatan ke dalam neraca saldo sehingga tidak diketahui dimana kesalahan ataupun kekeliruan dalam pencatatan di awal sebelum

disusunnya laporan keuangan. Dengan disusunnya neraca saldo dapat meminimalisir kesalahan pada saat penyusunan laporan keuangan.

4.2.2.4 Penyesuaian

Tahap selanjutnya adalah penyesuaian yang dilakukan pada aset lancar dan aset tetap. Penyesuaian merupakan langkah yang digunakan untuk mengetahui terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomis. Namun, desa Mulya Subur tidak melakukan penyesuaian atau *adjustmant* terhadap persediaan dan aset tetap yang dimiliki oleh desa

1. Aset Lancar

Aset lancar atau bahan habis pakai adalah aset yang di pakai dalam aktivitas operasional dengan jangka waktu dekat atau kurang dari satu tahun. Contoh dari aset lancar yang dimiliki oleh desa Mulya Subur seperti: Alat Tulis Kantor (ATK), benda pos dan materai, cetak dan penggandaan, serta alat kebersihan.

Desa Mulya Subur tidak menghitung dan menyajikan nilai persediaan yang tersisa sehingga persediaan Alat Tulis Kantor (ATK), benda pos dan materai, cetak dan penggandaan, serta alat kebersihan berjumlah Rp. 0.

Sedangkan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (lampiran II) terdapat pembelian pada Alat Tulis Kantor (ATK) dan benda pos tahun 2019 sebesar Rp 25.498.000, barang cetak dan penggandaan tahun 2019 sebesar Rp 6.212.000, serta alat listrik tahun 2019 sebesar Rp 1.800.000. Maka jurnalnya yaitu :

Alat Tulis Kantor	Rp 25.498.000
Kas	Rp 25.498.000
Barang Cetak dan Pengandaan	Rp 6.212.000
Kas	Rp 6.212.000
Alat Listrik	Rp 1.800.000
Kas	Rp 1.800.000

Setelah dikonfirmasi kepada Bendahara desa Mulya Subur ternyata persediaan tersebut telah habis terpakai selama 1 (satu) tahun. Hal inilah yang menyebabkan nilai persediaan di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Mulya Subur berjumlah Rp. 0.

Jurnal penyesuaian dilakukan untuk melaporkan semua belanja yang terjadi dalam periode akuntansi. Kemudian menyajikan nilai yang akurat pada Laporan Kekayaan Milik Desa, serta jurnal penyesuaian juga dapat menentukan berapa pendapatan yang diakui dan memisahkan antara biaya yang sudah menjadi beban dalam periode akuntansi. Dampak tidak dibuatnya jurnal penyesuaian ialah kurang saji pada beban yang menyebabkan aset dan ekuitas lebih saji pada laporan keuangan desa.

2. Aset Tetap

Menurut Hanafi dan Halim (2016:14): “Aset tetap adalah aset yang mempunyai wujud fisik (*tangible*), berumur panjang, yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk periode jangka panjang, dan biasanya tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.” Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya merupakan aset dalam katagori ini yang dimiliki oleh desa Mulya Subur. Berdasarkan PSAP No. 7

Paragraf 53-54 (dalam Erlina dkk, 2020:269): “Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan”. Menurut Donald E. Kieso dkk (2017:631) metode yang dapat digunakan untuk menghitung beban penyusutan, seperti: (a) Metode Aktivitas, (b) Metode Garis Lurus, (c) Metode Angka Tahun, dan (d) Metode Saldo Menurun. Desa Mulya Subur tidak melakukan penyusutan pada aset tetap yang dimiliki oleh desa sehingga nilai yang disajikan tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya dan nilai aset tetap yang disajikan pada Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2019 (lampiran I) bukan nilai yang sebenarnya karena desa Mulya Subur tidak menambahkan nilai aset tetap tahun 2018 yang masih memiliki masa manfaat dengan belanja modal yang terdapat pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (lampiran II).

Tabel 4.17
Aset Tetap

No	Aset Tetap	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	61.483.000	122.483.000
2	Gedung dan Bangunan	262.397.700	262.397.700
3	Jalan, Irigasi, dan Bangunan	1.700.019.800	1.700.019.800
4	Aset Tetap Lainnya	1.600.000	1.600.000

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Menghitung penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight line Methode*). Menurut Donald E. Kieso dkk (2017:631) “Pengecualian dari penyusutan ini adalah tanah, yang disusutkan hanya jika penurunan nilai yang material terjadi.” Perkiraan umur ekonomis untuk peralatan dan mesin ialah 5 tahun, gedung dan bangunan adalah 10 tahun, jalan, irigasi, dan

jaringan adalah 20 tahun, dan aset tetap lainnya ialah 5 tahun. Dibawah ini merupakan bentuk penyesuain aset tetap yang sebenarnya dilakukan desa Mulya Subur:

- 1) Nilai penyusutan pelatan dan mesin

$$\text{Pertahun 2018 : } \frac{\text{Rp } 61.483.000}{5 \text{ tahun}} = \text{Rp } 12.296.600$$

Adjusment:

Beban penyusutan peralatan dan mesin Rp 12.296.600

 Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Rp 12.296.600

Aset Tetap Tahun 2019 = Aset Tetap Tahun 2018 + Belanja Modal 2019

Pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun 2019 terdapat belanja modal peralatan dan mesin sebesar

Rp 66.000.000

Aset Tetap Tahun 2019 = Rp 61.483.000 + Rp 66.000.000

 = Rp 127.483.000

$$\text{Pertahun 2019 : } \frac{\text{Rp } 127.483.000}{5 \text{ tahun}} = \text{Rp } 25.496.600$$

Adjusment:

Beban penyusutan peralatan dan mesin Rp 25.496.600

 Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Rp 25.496.600

- 2) Nilai penyusutan gedung dan bangunan

$$\text{Pertahun 2018 : } \frac{\text{Rp } 262.397.700}{10 \text{ tahun}} = \text{Rp } 26.239.770$$

Adjustment:

Beban penyusutan gedung dan bangunan Rp 26.239.770

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Rp 26.239.770

Aset Tetap Tahun 2019 = Aset Tetap Tahun 2018 + Belanja Modal 2019

Pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun 2019 terdapat belanja modal gedung dan bangunan sebesar

Rp 90.087.000

Aset Tetap Tahun 2019 = Rp 262.397.700 + Rp 90.087.000

= Rp 352.484.700

Pertahun 2019 : $\frac{\text{Rp } 352.484.700}{10 \text{ tahun}} = \text{Rp } 35.248.470$

Adjustment:

Beban penyusutan gedung dan bangunan Rp 35.248.470

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Rp 35.248.470

3) Nilai penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan

Pertahun 2018 : $\frac{\text{Rp } 1.700.019.800}{20 \text{ tahun}} = \text{Rp } 85.000.990$

Adjustment:

Beban, dan penyusutan jalan, irigasi jaringan Rp 85.000.990

Akumulasi penyusutan jalan, irigasi jaringan Rp 85.000.990

Aset Tetap Tahun 2019 = Aset Tetap Tahun 2018 + Belanja Modal 2019

Terdapat belanja modal jaringan, irigasi, dan jaringan Rp 844.709.000

pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun 2019.

$$\begin{aligned} \text{Aset Tetap Tahun 2019} &= \text{Rp } 1.700.019.800 + \text{Rp } 844.709.000 \\ &= \text{Rp } 2.544.728.800 \end{aligned}$$

Rp 2.544.728.800

$$\text{Pertahun 2019 : } \frac{\text{Rp } 2.544.728.800}{20 \text{ tahun}} = \text{Rp } 127.236.440$$

Adjustment:

Beban, dan penyusutan jalan, irigasi jaringan Rp 127.236.440

Akumulasi penyusutan jalan, irigasi jaringan Rp 127.236.440

4) Nilai penyusutan aset lainnya

$$\text{Pertahun 2018 : } \frac{\text{Rp } 1.600.000}{5 \text{ tahun}} = \text{Rp } 320.000$$

Adjustment:

Beban penyusutan aset lainnya Rp 320.000

Akumulasi penyusutan aset lainnya Rp 320.000

Aset Tetap Tahun 2019 = Aset Tetap Tahun 2018 + Belanja Modal 2019

Terdapat belanja modal aset tetap lainnya Rp 3.059.000 pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Aset Tetap Tahun 2019} &= \text{Rp } 1.600.000 + \text{Rp } 3.059.000 \\ &= \text{Rp } 4.659.000 \end{aligned}$$

$$\text{Pertahun 2019 : } \frac{\text{Rp } 4.659.000}{5 \text{ tahun}} = \text{Rp } 931.800$$

Adjustment:

Beban penyusutan aset lainnya Rp 931.800

Akumulasi penyusutan aset lainnya Rp 931.800

Dampak tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki oleh desa dalam Laporan Kekayaan Milik Desa ialah beban kurang saji dan menyebabkan tingginya nilai aset tetap dari nilai seharusnya atau lebih saji di akhir periode akuntansi.

4.2.2.5 Tahapan Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap terakhir dalam siklus akuntansi. Pada tahap ini desa Mulya Subur membuat pelaporan yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. desa Mulya Subur dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi keuangan desa (Siskeudes).

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, serta SILPA tahun berjalan. Desa Mulya Subur telah membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum).

2. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa merupakan laporan yang berisikan informasi tentang kekayaan bersih milik desa dalam satu periode anggaran. Laporan kekayaan milik desa terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

Pada laporan kekayaan milik desa yang dilakukan oleh desa Mulya Subur masih terdapat beberapa kekeliruan. Hal ini disebabkan, desa tidak menghitung sisa persediaan yang dimiliki, dan aset tetap yang diperoleh pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak diakumulasi nilainya dilaporan kekayaan milik desa, serta nilai yang disajikan pada aset tetap bukan merupakan penjumlahan dari nilai aset tetap pada 2018 di tambah dengan belanja modal yang dilakukan di tahun 2019 pada laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2019, sehingga nilai yang disajikan pada tahun 2019 dalam laporan kekayaan milik desa tahun 2019 bukanlah nilai sebenarnya. Berikut format perhitungan aset tetap desa Mulya Subur yang seharusnya dilakukan.

Tabel 4.18
Perhitungan Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019
Desa Mulya Subur

Aset Tetap	Diperoleh		Total Aset Tetap yang Harus Dilaporkan di Tahun 2019
	2018	2019	
Tanah	0	0	
Peralatan dan Mesin	Rp 61.483.000	Rp 127.483.000	Rp 188.966.000
Gedung dan Bangunan	Rp 262.397.700	Rp 352.484.700	Rp 614.882.400
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 1.700.019.800	Rp 2.544.728.800	Rp 4.244.748.600
Aset Lainnya	Rp 1.600.000	Rp 4.659.00	Rp 6.259.000
Jumlah	Rp 2.025.500.500	Rp 3.029.355.500	Rp 5.054.856.000

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Tabel 4.19
Daftar Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019
Desa Mulya Subur

Aset Tetap	Beban Penyusutan Aset Tetap 2018		Beban Penyusutan Aset Tetap 2019	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2019
	2018	2019		
Peralatan dan Mesin	Rp 12.296.600	Rp 12.296.600	Rp 25.496.600	Rp 50.089.800
Gedung dan Bangunan	Rp 26.239.770	Rp 26.239.770	Rp 35.248.470	Rp 87.728.010
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 85.000.990	Rp 85.000.990	Rp 127.236.440	Rp 297.238.420
Aset Tetap Lainnya	Rp 320.000	Rp 320.000	Rp 931.800	Rp 1.571.800
Jumlah	Rp 123.857.360	Rp 123.857.360	Rp 188.913.310	Rp 436.628.030

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Tabel 4.20
Laporan Kekayaan Milik Desa
Sampai Dengan 31 Desember 2019

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	ASET		
1.1	Aset Lancar		
1.1.1	Kas dan Bank	18.746.900	27.939.900
1.1.1.2	Kas di Bendahara Desa	0,00	0,00
1.1.1.3	Rekening Kas Desa	18.746.900	27.939.900
1.1.2	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.1	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.2	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.3	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.4	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.5	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.6	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.7	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.8	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.1	Persediaan Benda Pos dan	0,00	0,00

	Material		
1.1.3.2	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.3	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.4	Persediaan Alata Listrik/Lampu/Batterai	0,00	0,00
1.1.3.5	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.6	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.7	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.8	Persediaan Barang Untuk Dihilahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		18.746.900	27.939.900
1.2	Investasi		
1.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0,00	0,00
Jumlah Investasi		0,00	0,00
1.3	Aset Tetap		
1.3.1	Tanah		
1.3.2	Peralatan dan Mesin	127.483.000	61.483.000
1.3.3	Gedung dan Bangunan	352.484.700	262.397.700
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.544.728.800	1.700.019.800
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	4.659.000	1.600.000
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(188.913.310)	(123.857.360)
Jumlah Aset Tetap		2.840.442.190	1.901.643.140
1.4	Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5	Aset Tidak Lancar	0,00	0,00
Jumlah Aset Tidak Lancar		0,00	0,00
Total Aset		2.859.189.090	1.929.583.040
2	Kewajiban		
2.1	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4	Pendapatan Diterima di	0,00	0,00

	Muka		
2.1.5	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Total Kewajiban			
3	Ekuitas		
3.1	Ekuitas		
3.1.1	Ekuitas	2.840.442.190	1.929.583.040
3.1.2	Ekuitas SAL	18.746.900	27.939.900
Jumlah Ekuitas		2.859.189.090	2.859.189.090
Total Ekuitas		2.859.189.090	2.859.189.090
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		2.859.189.090	2.859.189.090

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka, peneliti akan memberikan ringkasan secara menyeluruh melalui simpulan dan saran sehingga dapat memberikan manfaat yang berguna di masa yang akan datang.

5.1 Simpulan

1. Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam menyusun laporan keuangan desa. Dasar pencatatan yang digunakan oleh desa Mulya Subur adalah *Single Entry* dan Dasar pengakuan yang digunakan desa Mulya Subur adalah basis kas (*Cash Basic*).
2. Pada tahap pencatatan yang dilakukan oleh desa Mulya Subur dimulai dari buku kas umum, buku bank desa, buku kas pembantu kegiatan, dan buku pembantu pajak. Dalam tahap pencatatan ini sudah sesuai dengan Pedoman Asistensi Keuangan Desa. Pada tahap penggolongan desa Mulya Subur tidak membuat buku besar sehingga belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.
3. Pada tahap pengikhtisaran desa Mulya Subur tidak membuat neraca saldo. Kemudian desa Mulya Subur tidak membuat penyesuaian terhadap persediaan dan aset tetap.
4. Pada tahap pelaporan desa Mulya Subur membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan

Kekayaan Milik Desa. Hal ini sudah sesuai dengan Pedoman Asistensi Keuangan Desa tetapi belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

5. Pada tahap pelaporan, aset tetap yang disajikan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019 tidak menyajikan nilai yang sebenarnya.

5.2 Saran

1. Sebaiknya Pemerintahan Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan melakukan pengelolaan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Berterima Umum (PABU). Hal ini bertujuan agar laporan keuangan yang dibuat oleh desa Mulya Subur menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
2. Sebaiknya desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan pada tahap penggolongan membuat buku besar serta pada tahap pengikhtisaran membuat neraca saldo, sehingga saat melakukan pengelolaan keuangan desa dapat bertambah baik dan memperkecil terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam membuat laporan keuangan desa.
3. Pemerintahan Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sebaiknya menyajikan nilai aset tetap yang sebenarnya serta membuat akumulasi penyusutan pada aset tetap yang dimiliki oleh desa.

4. Sebaiknya Pemerintah Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dapat menghitung penyesuaian pada nilai aset tetap dan persediaan sebelum melaporkannya ke dalam Laporan Kekayaan Milik Desa. Hal ini bertujuan, agar laporan keuangan yang disajikan dapat lebih akurat.
5. Sebaiknya Pemerintah Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan melakukan pelatihan bagi Pemerintah Desa terutama pada Bendahara atau KAUR Keuangan guna menambah wawasan serta kemampuan terutama dalam menyusun laporan keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arens Alvin A. Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley 2015. *Auditing Dan Jasa Assurance*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Donal, Kieso E. Weygandt Jerry J. dan Warfield D. 2017. *Akuntansi Keuangan Menengah, Volum I*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto. 2020. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghony, Djunaidi M. dan Fauzan Almanshur. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Halim, Abdul. dan Muhammad Syam Kusufi. 2018. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, Mamduh M. dan Abdul Halim. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Hoesda, Jan. 2016. *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irina, Fristiana. 2017. *Metode Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Dua Satria Offet.
- Rahmaniar, Ani. dan Soegijanto. 2016. *Pengantar Akuntansi Dasar I Siklus Akuntansi (Accounting Cycle) Untuk Perusahaan Jasa*. Bogor: In Media.
- Sekaran, Uma dan Bougie Roger. 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sinaga, Yayah. 2016. *Dasar Pencatatan, Buku Besa, Neraca Saldo, Ayat Jurnal Penyesuaian, Neraca Jalur, Laporan Keuangan, Jurna Penutup Dll*. Jakarta: Langit Publisher.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Warren, Carl S. James M. Reeve, Jonathan E. Durhac, Ersa Tri Wahyuni, dan Amir Abadi Jusuf . 2017. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijaya, David. 2018. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media.
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2017. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*. Jakarta: Kompartemen Asp.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Lembaga Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Lembaga Negara Republik Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintahan. 2016. *Konsep Publikasikan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa*. Jakarta.

